

BAB 2

KEHIDUPAN MASYARAKAT JEPANG SEBELUM ADANYA REFORMASI SEIKATSU KAIZEN

Jepang memiliki sejarah yang panjang dalam mengubah pola kehidupan negara dan masyarakatnya hingga menjadi modern dan sejahtera. Jepang dengan pola kehidupan negaranya yang maju hingga saat ini selalu melakukan perkembangan yang pesat diberbagai bidang seperti ekonomi, sosial, politik dan budayanya untuk memajukan negaranya. Jepang sendiri pernah jatuh kedalam masa keterpurukkan pada Perang Dunia II. Jepang pada awal mulanya menutup negara dari pengaruh luar dan kemudian membuka negara pada restorasi Meiji, hal itu dikarenakan sadar betapa tertinggal negaranya dari negara lainnya. Jepang melakukan reformasi perbaikan pola hidup dengan belajar banyak dari negara maju dan menerapkannya di Jepang sesuai kondisi serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara. Masyarakat Jepang mampu mepercepat kemajuan negaranya dan menjadi masyarakat yang unggul di berbagai bidang. Namun hal dari tersebut berbading terbalik dengan kehidupan Masyarakat Jepang dan Jepang sendiri sebelum adanya reformasi *Seikatsu Kaizen*. Pada bab ini penulis akan menjabarkan akan kehidupan masyarakat Jepang saat itu.

2.1 Awal Permasalahan Muncul dari Tidak Beradabnya Masyarakat Jepang.

2.1.1 Tata Krama atau Manner yang Kurang Pada Masyarakat Jepang.

Jepang sudah dikenal dengan keunikan budaya, tatakrama atau manner yang dimiliki oleh masyarakat Jepang yang hingga kini tetap terus menjadi bagian untuk dilestarikan dan digunakan sehari-hari dalam kehidupannya. Orang-orang dari negara luar Jepang juga menghormati, memahami, menjaga, mempelajari dan menerapkan tata krama atau manner tesebut dalam menjalanin kehidupan secara bersama-sama di Jepang. Tatakrama atau manner yang berasal dari Jepang seperti *Ojigi* (cara hormat Jepang), *Temiyage* (bertukar oleh-oleh), *Meishi koukan* (bertukar kartu nama), *Akushu* (bersalaman) dan hal lainnya. Hal tersebut tidak serta merta membuat masyarakat Jepang ditakdirkan sebagai manusia yang beradab namun, pada awal mula kehidupan masyarakat Jepang dalam sejarahnya sebernarnya tidak beradab.

Hal tersebut terbukti pada tahun 1860, Jepang membuka jalur perdagangan

impor dari luar negeri, orang Amerika dan Eropa yang tinggal di Jepang pada saat itu mengeluh tentang betapa masyarakat yang Jepang tidak beradab. Menurut Ong (2019: 15), pada waktu itu baik anak-anak maupun orang dewasa buang air kecil hingga air besar sembarangan di pinggir jalan pada siang hari, pada musim panas warga seenaknya berlalu lalang di jalanan dalam kondisi pakaian setengah terbuka atau telanjang, para pria dan wanita mandi bersama pada bak mandi di tempat pemandian umum karena semua rumah masyarakat hampir tidak memiliki kamar mandi, lebih tidak beradabnya lagi bahkan pria dan wanita bercumbu dengan vulgar di tempat umum, tong-tong sampah terbuka tanpa ditutup dengan berisi kotoran manusia yang di angkut di jalan raya dan sebagainya. Penjelasan tersebut sehingga membuat citra Jepang tercoreng di mata orang Amerika dan Eropa.

Menurut Komarudin (2021: 6), para tokoh masyarakat pada saat itu sadar bahwa Jepang tidak akan berubah hanya dengan pemerintahan yang otoriter, Jepang hanya akan bisa menjadi negara kuat, jika rakyatnya berubah dari negara tidak beradab menjadi negara beradab. Namun terdapat kendala utama dalam mengubah Jepang menjadi negara yang setara dengan negara-negara Barat, yaitu adanya pasal perjanjian perdagangan, yang ditandatangani oleh pemerintahan Tokugawa sebelumnya dengan 5 negara (Amerika Serikat, Belanda, Rusia, Inggris dan Prancis). Perjanjian tersebut mencantumkan bahwa warga dari 5 negara tersebut memiliki hak kebebasan politik selama berada di Jepang, yaitu; jika melakukan pelanggaran, tidak dapat dijerat dengan undang-undang di Jepang, karena Jepang belum dianggap sebagai negara yang beradab (Ong, 2019: 22). Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah untuk lebih proaktif mengubah adat negaranya sebagai misi utama demi menuju negara Jepang yang unggul dengan negara-negara Asia lainnya dan setara dengan negara Barat.

2.1.2 Dampak Penghapusan Kelas Sosial.

Sebelum 1868, Jepang merupakan negara yang menganut dari sistem hierarki sosial yang ketat, yang terdiri dari empat kelas sosial: *Bushi* yang terdiri dari kelas Militer, Bangsawan, Penguasa, atau Samurai, *Noomin* dari kelas Petani, *Shokkoo* terdiri dari Tukang, Pekerja, atau Pengrajin, dan *Shoonin* dari kelas Pedagang. Keempat kelas sosial ini dikenal dengan singkatan *Shi-Noo-Koo-Shoo*. Para Sejarawan Jepang telah membedakan kelas antara samurai kelas lokal (peringkat rendah) dan samurai kelas prajurit yang disebut *Gunji kizoku* (kaum bangsawan militer Jepang). Pada akhir abad ke-delapan kaum militer ini memiliki status yang tinggi dalam

pemerintahan (sering memegang pangkat pengadilan yang tinggi), memimpin kelompok pejuang, dan melayani bangsawan sipil. Hingga pada tahun 1868, kaum bangsawan militer ini menumbangkan pemerintahan Tokugawa, menghancurkan struktur lama dan menegakkan tatanan politik, sosial baru yang diinspirasi dari peradaban Barat hingga pemerintahan baru yang dikenal dengan restorasi Meiji (Meiji Ishin) terbentuk. Berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakatannya, pemerintahan Meiji mengeluarkan kebijakan tentang penghapusan *Shin-Noo-Koo-Shoo* yang dulu diberlakukan semasa pemerintahan Tokugawa.

Namun dampak dari penghapusan *Shin-Noo-Koo-Shoo* kemudian muncul persoalan dimana semua rakyat bebas melakukan apa-pun demi kesenangan dan kepentingan pribadi seperti bebas memilih pekerjaan, hingga bergerak tanpa batasan. Karena tiadanya panutan (tokoh panutan), banyak orang bertindak dengan prinsip tujuan menghalalkan segala cara (Ong, 2019: 26). Masuknya ilmu pengetahuan modern juga banyak memberi dampak kepada masyarakat. Kondisi adat di Jepang pada waktu itu sangat kacau walaupun pemerintah telah mengesahkan sejumlah undang-undang, tetapi tetap saja banyak terjadi pelanggaran sehingga membuat penjara dipenuhi dengan orang-orang yang melanggar. Berikut ini beberapa kejadian yang menggambarkan bagaimana kebiasaan adat yang buruk pada masyarakat Jepang setelah kelas sosial dihapus oleh pemerintah Meiji (Ong, 2019: 28-34):

- a. Antar masyarakat dan antara rakyat dengan pemerintah tidak kompak karena pejabat cenderung menggunakan tindakan represif kepada rakyat (tekanan), sehingga rakyat memusuhi pemerintah. Padahal tanpa kerja sama rakyat dengan pemerintah, negara tidak akan bisa maju.
- b. Status sosial perempuan masih lebih rendah (akibat minimnya pendidikan dan praktek poligami) dibandingkan dengan laki-laki. Padahal kualitas keluarga dan pendidikan ditentukan dari peran seorang Ibu yang menjadi salah satu faktor negara bisa menjadi maju karena rakyatnya pintar.
- c. Dengki dan iri sesama anggota masyarakat yang diakibatkan dari kecurangan yang merajalela pada saat itu, seperti; pejabat publik bertindak tidak adil, partai politik yang tidak peduli dengan kualitas calon hanya mementingkan sendiri kecuali jika ada mahar, penyuapan pemilih dimana-mana, dan peraturan pemerintah

berubah dalam waktu singkat sehingga rakyat bingung.

- d. Bagi masyarakat Jepang yang menganut agama Buddha, Kristen, Shinto, mereka menjalankan kehidupan agamanya dengan antusias tetapi mereka tidak melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Para penganut agama hanya peduli menyumbang untuk ibadah, ikut kegiatan di tempat ibadah, dan ziarah ke tempat jauh tanpa memperdulikan hal lainnya. Sebagai contohnya; tidak membayar pajak, menunggak uang sekolah anak mereka, enggan menyumbang untuk fakir miskin hingga rela memutus hubungan dengan keluarga untuk masuk agama. Meskipun mereka beragama tetapi dari perilaku mereka masih mempercayai sesuatu yang diluar nalar (takhayul), seperti; banyak orang berdoa untuk kesembuhan tetapi tidak mau mengambil langkah untuk berobat ke dokter, banyak orang berdoa supaya memenangkan perkara, supaya orang lain celaka, dan supaya bisa bercerai dengan pasangannya.
- e. Masyarakat Jepang terlalu terobsesi dan berlagak dari meniru pakaian maupun hingga tata krama dengan segala hal tentang yang berbau Barat. Seharusnya masyarakat Jepang dapat memilih budaya Barat yang bermanfaat harus diterapkan dan budaya Jepang yang tidak bermanfaat harus dibuang.
- f. Masyarakat Jepang dari masing-masing daerah berbicara dalam dialek daerahnya masing-masing karena belum adanya penyeragaman bahasa, sehingga menimbulkan kekacauan dalam komunikasi (miskomunikasi) antar masyarakat.
- g. Banyak masyarakat Jepang pada waktu itu cenderung mau seenak-enaknya saja dalam mengatur, tidak mau berusaha, kurang adanya kemauan keras dalam berusaha dan bergantung pada orang lain. Contohnya seperti; banyak orang tua ingin hidup tanpa bekerja dengan menjual putri mereka untuk dijadikan pelacur atau dinikahkan walau usianya masih muda, sebaliknya banyak anak yang ingin hidup berfoya-foya dan tidak perlu bekerja dengan mengharapkan harta warisan dari orang tua, orang hidup dengan menumpang di rumah sanak saudaranya, pedagang menyuap pejabat untuk mendapatkan proyek dan orang ingin cepat kaya

- tanpa bekerja dengan berjudi.
- h. Banyak masyarakat Jepang yang mudah pasrah, kurang berambisi dan selalu mencari alasan untuk tidak ingin membuang tenaga atau tidak ada usaha sama sekali. Hal tersebut didasari dari pola pikir orang Jepang yang pada saat itu, seperti; saya sudah tua, saya masih terlalu muda, saya orang kecil, saya orang bodoh, dan saya hanya tukang becak. Oleh karena pola pikir tersebut tidak mudah untuk memperbaiki moral, mengubah adat, menghapus pelacuran, mengembangkan usaha, dan sebagainya pada masyarakat Jepang saat itu.
 - i. Tidak menepati janji atau tidak jujur, tidak menghargai waktu atau istilah yang lebih dikenalnya adalah jam karet. Contohnya seperti; bekerja seperti main-main, bekerja tapi disertai dengan banyak basa-basi, tidak datang tepat waktu, hingga datang terlambat menjadi hal yang biasa dan serampangan menyuruh orang lain menunggu. Seharusnya orang Jepang saat itu bisa mencontoh dari orang Inggris dan Amerika yaitu, tentang belajar budaya disiplin dan menghargai waktu atau tidak membuang-buang waktu.
 - j. Gaya hidup tinggi dan boros, disebabkan masyarakat Jepang yang pada waktu itu mempunyai harga beraga kaya dan ingin terlihat berkelas padahal mereka tidak sesuai dengan kemampuan ekonominya tetapi malah menyengsarakan diri sendiri.
 - k. Gengsi yang tinggi dan banyak basa-basi. Contohnya seperti Upacara pernikahan, kematian, perayaan tahunan dan kelahiran bayi dijadikan ajang untuk pamer, berpesta pora sambal mabuk-mabukkan bahkan hingga bertengkar setelah mabuk di acara pernikahan yang seharusnya berlangsung dengan khidmat. Menerima cemoohan pelit jika tidak menjamu para pelayat padahal keluarga yang sedang berduka tersebut dalam kondisi kesulitan keuangan yang tidak jarang hal tersebut membuat jatuh bangkrut maupun juga dalam acara pernikahan, dan melakukan ritual-ritual konyol yang pada akhirnya menyebabkan sengsara.
 - l. Pelacuran yang dilegalkan oleh pemerintah pada waktu itu menyebabkan merusakkan keharmonisan rumah tangga,

menurunkan produktivitas kelahiran bayi dan menghambat kemajuan Jepang sendiri.

Jika kebiasaan pada masyarakat Jepang dari penjelasan diatas tidak diubah maka negara Jepang sendiri tidak akan bisa berkembang, oleh karena itu jika Jepang ingin maju seperti negara Barat maka penting sekali untuk mengubah kebiasaan adat lama (kebiasaan buruk) pada masyarakat Jepang. Menurut Witherington (1982: 15) dalam Novita (2018: 40), kebiasaan merupakan merupakan sesuatu cara bertindak yang telah dikuasai atau dipelajari secara berulang-ulang, menjadi menetap dan bersifat otomatis. Penjelasan tersebut dapat diketahui arti lainnya dalam kebiasaan yaitu pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seseorang yang melakukan hal yang sama secara berulang. Menurut Mu'in (2011: 161-162), Karakter adalah sebuah kebiasaan yang menjadi sifat alamiah kedua (*character is a habit that becomes second nature*). Kalimat tersebut bermakna jika ingin kebiasaan seseorang atau adat seseorang dapat berubah, maka karakter seseorang tersebut-pun dapat berubah. Hal tersebut dapat diketahui jika ingin mengubah karakter masyarakat Jepang dari tidak beradab menjadi beradab maka hal yang harus dilakukan adalah mengubah kebiasaan masyarakat Jepang atau adat masyarakat Jepang yang tidak bermanfaat.

2.2 Munculnya Permasalahan yang Berhubungan Dengan Agama di Jepang.

2.2.1 Para Biksu dari Agama Buddha yang Hidup Berfoya-foya.

Restorasi Meiji pada tahun 1868, membawa negara Jepang pada akhir masa feudalism dan membuka mata Jepang akan dunia luar sehingga terjadinya modernisasi, adalah malapetaka bagi kelompok agama Buddha serta kepada para biksu. Menurut Ong (2019: 51), kelompok ini menjadi sasaran tembak oleh penguasa baru, hal tersebut berbanding terbalik karena kelompok ini dilindungi oleh penguasa pada era sebelumnya. Hal tersebut dimulai karena terjadi kerusuhan dengan penguasa Jepang pada tahun 1637-1638, faktor kerusuhan tersebut diawali dari masuknya misionaris Portugis yang cukup berhasil untuk menyebarkan ajaran agama Kristen sehingga mereka diusir karena dianggap menghasut rakyat Jepang untuk membangkang terhadap pemerintah. Setelah kejadian tersebut pemerintah memberikan wewenang kepada para biksu yang bekerjasama pada masing-masing kuil ibadah menjadi pengawas masyarakat Jepang yang tinggal disekitar masing-masing kuil, sehingga semua masyarakat Jepang diwajibkan untuk menganut agama Buddha oleh

pemerintah.

Wewenang tersebut menyebabkan para biksu tidak perlu khawatir lagi apabila umatnya pindah agama dan tidak perlu menyebarkan ajaran agama lagi. Hal tersebut berimbas kepada sikap para biksu yang menimbulkan rasa ketidaksukaan masyarakat karena dianggap hanya mengemban tugas sebagai pemimpin ritual, seperti upacara kematian dan hidup bersenang-senang dari sedekahan umatnya yang berlimpah. Akibatnya dalam kehidupan keagamaannya, para biksu dari agama Buddha kehilangan wibawanya beserta ekonominya karena setelah restorasi Meiji tahun 1868, pemerintah Meiji berulang kali memerintahkan untuk memisahkan antara Shinto dan Buddha. Permisahan antara Shinto dan Buddha tersebut memunculkan *Haibutsu kishaku* (gerakan anti-Buddha) dan ditambah sentiment rasa ketidaksukaan masyarakat selama ini yang menimbulkan gerakan nasional dalam negeri yang berasal dari emosi benci yang menyebabkan terjadinya penghancuran patung disertai perusakan kuil-kuil Buddha.

Menurut Minderop, (2010: 44), emosi benci adalah keadaan yang menggambarkan permusuhan dan ketidaksukaan. Artinya rasa benci terjadi karena sakit hati, sehingga timbulnya nafsu atau keinginan untuk menghancurkan objek yang menjadi sasaran kebencian. Penjelasan tersebut sangat penting untuk membangun rasa suka kepada masyarakat untuk membangun stigma positif di kehidupan masyarakat, apabila masyarakat suka perasaan benci tersebut akan hilang.

2.2.2 Keraguan Tentang Agama Shinto.

Shinto dikenal dengan sebutan ‘jalan tuhan’, merupakan agama yang berasal dari nenek moyang negara Jepang. Diajarannya dikenal untuk menyembah dewa-dewi atau *kami*, yang hanya masyarakat Jepang saja yang menganut agama Shinto sehingga seperti membuat orang luar Jepang tidak mengetahui tentang agama ini. Menurut Ong (2019: 65) agama Shinto tidak mempunyai kitab suci, kepercayaan agama ini bersifat panteis yaitu ‘tuhan merupakan semuanya’, tidak ada satu figur sentral sebagai objek pemujaan, dan tidak ada ajaran moral atau larangan dengan konsekuensi yang jelas sehingga para ahli di Jepang ragu tentang untuk memasukkan Shinto kedalam kategori agama. Untuk mendukung penjelasan tersebut seperti yang disebutkan bahwa agama Shinto adalah agama warisan nenek yang berasal Jepang yang menyembah *kami* dan menyembah arwah leluhur. Masyarakat Jepang meyakini bahwa dengan percaya akan keberadaan *kami*, masyarakat akan mendapatkan perlindungan, terbebas

dari bencana, dan ketidakberuntungan dari *kami*. Menurut Ono (1987: 6) dalam Devi (2014: 476), terdapat banyak sekali *kami* yang disembah, sering kali berkaitan dengan alam seperti dewa matahari, dewa pohon, dewa air dan lain sebagainya. Agama Shinto dapat dikatakan berasal dari penggabungan dari animisme yaitu kepercayaan kepada makhluk halus atau roh, kepercayaan terhadap kepercayaan alam semesta dan arwah leluhur.

Menurut Devi (2014: 478) menyebutkan sebelum memasuki zaman Meiji (1868-1945) Agama Shinto sendiri terlupakan pada pemerintah Ashikaga (133-1568), demikian hal yang sama juga terjadi pada zaman Tokogawa (1615-1868). Oleh karena itu menurut Rochmah (2010: 19), kepercayaan itu sendiri bersifat universal yang dimiliki bersama oleh semua umat manusia. Kepercayaan dapat diartikan yaitu satu kodrat yang secara alamiah dimiliki oleh umat manusia, sama halnya dengan masyarakat Jepang yang menyakini Shinto walaupun oleh para ahli masih ragu tentang Shinto. Ditambah lagi dalam kaitannya dengan hal ini menurut Rochmah (2010: 19), menyatakan bahwa manusia standar adalah manusia yang berkepercayaan atau berkeyakinan. Artinya apabila Shinto sudah melekat dan menjadi kepercayaan banyak masyarakat Jepang sejak awal yang berarti masyarakat Jepang sudah menjadi manusia standar, maka diperlukan peran pemerintah untuk Shinto menjadi ideologi dan agama tandingan seperti agama Buddha.

2.2.3 Agama Kristen di Mata Masyarakat dan Pemerintah Jepang.

Pada abad ke-15 para misionaris dari Portugis dan Spanyol (orang Eropa) pertama kali masuk ke Jepang untuk melakukan perdagangan di daerah pesisir sambil secara tidak langsung menyebarkan agama Kristen. Kedatangan orang Eropa menurut *The International Society for Educational Information* dalam Nurdin (2022: 25), berpengaruh besar terhadap bangsa Jepang. Para misionaris dalam waktu singkat dapat menyebarkan agama Kristen ke kalangan militer karena mereka menggunakan Kristen atau budaya Barat terutama teknologinya sebagai kepentingan perang atau untuk politisasi pemerintahan. Oleh karena itu akhirnya pemerintahan Jepang melarang agama Kristen yang dianggap berbahaya, langkah tersebut juga sebagai suatu alat untuk melestarikan keterpaduan struktur sosial dan politik langkah drastis yaitu, melakukan penutupan pintu Jepang dari berbagai penjuru dunia luar sebelum akhirnya larangan tersebut dicabut pada tahun 1873. Selama periode tersebut, pemerintah mensosialisasikan citra Kristen sebagai agama yang jahat (Ong, 2019: 75). Artinya

agama Kristen yang dianggap bahaya atau jahat pada saat itu, dapat dikatakan bahwa Kristen tidak memiliki pengaruh yang kuat dalam kebudayaan Jepang.

Hal tersebut terjadi kemungkinan karena adanya unsur monotheisme yaitu kepercayaan atau keyakinan bahwa tuhan hanya ada satu dan berkuasa penuh atas segala hal yang mengakibatkan agama ini sulit diterima atau diasimilasikan dengan kebudayaan Jepang. Kemungkinan lainnya yaitu, peraturan yang cukup keras dari pemerintah Jepang saat itu yang menghambat penyebaran agama Kristen dan perkembangan Kristen sendiri sebagai agama karena dianggap tidak cocok dengan gaya hidup orang Jepang. Salah satu contohnya adalah tidak memperbolehkan minuman keras, tidak memperbolehkan seks bebas dan hal-hal lainnya yang sifatnya duniawi kesemuanya ini dilakukan tidak mengganggu lingkungan. Menurut Herlina (2011: 115), hal itu bertentangan dengan secara tradisional agama Shinto yang dianut oleh orang Jepang yaitu, memusatkan pada kesejahteraan kelompok sedangkan Buddha memperhatikan kesejahteraan keluarga. Maka dapat diketahui didalam kehidupan orang Jepang telah terjadi percampuran atau sinkritisme yaitu pencampuradukkan berbagai unsur aliran atau paham dengan agama-agama dari luar Jepang, namun orang Jepang tidak mau ambil pusing terhadap hal tersebut hingga kini.

Pertentangan agama Kristen yang diakibatkan perbedaan budaya pada masyarakat Jepang dan pemerintah Jepang, memunculkan stigma buruk pada agama Kristen tersebut. Menurut Goffman (2003) dalam Purnama (2016: 30), stigma merupakan tanda yang dibuat pada tubuh seseorang untuk diperlihatkan dan menginformasikan kepada masyarakat bahwa orang-orang yang mempunyai tanda tersebut merupakan seorang budak, kriminal, atau seorang penghianat serta suatu ungkapan atas ketidakwajaran dan keburukan status moral yang dimiliki seseorang. Artinya stigma ini mengacu kepada atribut yang memperburuk citra seseorang atau kelompok, walaupun ajaran dalam agama Kristen tersebut sesuatu hal yang positif bagi kehidupan masyarakat Jepang dan sudah seharusnya Jepang belajar dari kebudayaan Barat yang bermanfaat termasuk dari agama Kristen.

2.3 Belum Adanya Asimilasi Budaya Antara Jepang Dengan Negara Luar Jepang.

2.3.1 Status Sosial Budaya Jepang Belum Beradab di Mata Orang-orang Barat.

Di Jepang dan juga di negara-negara Asia lainnya, modernisasi sering kali identik berbenturan dengan westernisasi (Barat). Hal ini karena modernisasi yang terjadi di negara-negara tersebut seringkali berarti menerima budaya Barat dan

mengakibatkan perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, menurut Prof. Hideo Kishimoto dalam Naofusa (2016: 1), pernah menunjukkan perbedaan antara modernisasi dan westernisasi sebagai berikut:

Westernization would mean that a certain indigenous cultural element of the traditional East is replaced by the penetrating Western element, and the functional role of the former is taken over by the latter.

Artinya dari penjelasan tersebut adalah Modernisasi, di sisi lain juga pada dasarnya berarti membentuk kembali sistem budaya menjadi mode baru atau sesuatu yang baru.

Dalam kasus di Jepang, seperti pola pakaian, makanan, gaya rambut, dan rumah Barat dapat dianggap sebagai bagian dari westernisasi. Hal didukung dengan pernyataan (Ong, 2019: 89), mengatakan pada tahun 1870an dan 1880an, budaya Barat mulai dari makanan dan pola pakaian pada saat itu banyak ditiru oleh masyarakat Jepang, terutama kaum urban. Masyarakat Jepang yang pada saat itu cenderung ingin mencoba sesuatu yang sebelumnya belum pernah dicoba seperti memakan sapi yang sebelumnya dilarang dalam agama Buddha, mencoba-coba pakaian ala Barat, tampilan gaya rambut dan sebagainya. Namun dalam hal budaya seperti Kabuki yaitu seni teater rakyat Jepang, cerita yang dibawakan dalam Kabuki terlalu vulgar atau porno sedangkan budaya lain seperti Sumo yaitu pertandingan gulat antar kampung yang diselenggarakan dengan pesumo yang hampir terlanjang, sehingga dianggap tidak beradab oleh orang-orang Barat.

Oleh karena itu diperlukan perbaikan peningkatan status sosial dari tidak beradab menjadi beradab untuk budaya Jepang seperti Kabuki dan Sumo agar pantas jadi kebanggaan Jepang di mata orang-orang Barat. Menurut Adi (2003: 67) dalam Sari (2018: 48), peningkatan atau meningkatkan berasal dari kata tingkat, yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang membentuk susunan. Artinya tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf, dan kelas, sedangkan peningkatan berarti kemajuan yang dapat digambarkan dengan perubahan dari keadaan atau sifat yang negatif berubah menjadi positif. Lalu status sosial atau kedudukan sosial menurut Soekanto (2009: 210), merupakan tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya berhubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Artinya yaitu kedudukan seseorang dalam kelompok atau masyarakat, maka apabila Jepang bisa membuat sesuatu baru atau menambahkan

sesuatu sebagai peningkatan status Budayanya seperti Kabuki dan Sumo, sehingga orang-orang Barat sebagai penonton dapat menilainya dengan layak sekaligus sebagai ajang promosi budaya Jepang sendiri.

2.3.2 Moral Semangat Bushido Hanya Dimiliki oleh Kaum Samurai.

Secara sejarah Bushido berkembang abad-17 pada zaman Edo (1603-1868), namun pada zaman Heian (794-1185), kode etik ini mulai muncul. Shogun Tokugawa pada masa Edo, Bushido ditetapkan sebagai kode etik keprajuritan dikonseptualisasikan dan menjadi jalan hidup Samurai. Dalam strata sosial feodal, para Samurai merupakan kelas terhormat yaitu sebagai pertarung yang dihormati dalam masyarakat dan tradisi Jepang, mereka bahkan bisa menjadi *diamyo* (tuan tanah) bahkan hingga menjadi *shogun* (penguasa lokal), walaupun jumlah mereka atau kelompok mereka relatif kecil. Para Samurai juga mempunyai peranan sangat penting yaitu dalam menjaga keamanan dan ketertiban sosial. Selain Bushido sebenarnya tiap-tiap strata lainnya memiliki pemikiran dan ajaran tersendiri yang mereka jadikan pedoman dalam berperilaku. Sebagai contoh seperti kaum pedagang memiliki moralitas untuk selalu menekankan humanisme, objektivitas dan rasionalitas, di samping itu tentu saja terpengaruh oleh kehidupan feodal dalam pembentukan akal budi mereka. Namun sama halnya dengan Bushido dan tiap-tiap strata lainnya belum diterapkan ke keseluruhan masyarakat Jepang hingga pada zaman Meiji.

Menurut Mulyadi (2014: 76), nilai-nilai moralitas yang ada pada Bushido merupakan kombinasi dari ajaran konfusianisme yaitu ajaran-ajaran tentang etika, ajaran Zen, dan Shinto. Artinya konfusianisme menyumbangkan harmoni sosial seperti kesusilaan, sopan santun, ajaran Zen untuk mengembangkan harmoni pribadi seperti keheningan diri, refleksi, perenungan diri, dan sedangkan Shinto mengajarkan untuk keutamaan sikap setia kepada Kaisar. Menurut Yulianti (2019), Etika Bushido mengajarkan prinsip-prinsip nilai moral. Maka diartikan moral Etika Bushido dan strata pendukung lainnya dapat menjadi kunci bagi pembentukan dan secara prosesnya bisa membentuk aturan dalam bertingkah laku yang sesuai dengan akal budi tadi pada masyarakat Jepang.

2.3.3 Tidak Ada Moral dan Figur Panutan Pada Masyarakat yang Kesulitan Untuk Hidup Akibat Dari Perang.

Kemajuan Jepang yang demikian pesat tentunya terdapat banyak faktor yang mendukungnya. Salah satunya menurut Ong (2019: 99), pada tahun 1904-1905, Jepang berperang dengan Rusia, saat itu biaya perang yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang setara dengan sekitar 7 kali APBN Jepang, dan diperoleh dengan menaikkan pajak di dalam negeri dan pinjaman dari luar negeri. Walaupun perang berakhir, Jepang yang sebelumnya pada tahun 1894-1895 menang perang melawan China, sehingga memperoleh rampasan perang yang dijadikan modal untuk membangun industri Jepang pada saat itu. Namun lain ceritanya dari hal tersebut menjadi berbeda pada perang Jepang dengan Rusia, Jepang pada perang dunia I dan perang dunia II, oleh karena itu penulis akan memaparkan peristiwa yang diakibatkan perang pada Jepang dalam Ong (2019: 98-126), sebagai berikut:

1. Paham sosialisme mulai merambat Jepang, paham sosialisme yang berkembang di Eropa sejak akhir abad ke-19, mulai masuk ke Jepang dan mendapat simpatik dari kaum intelektual sehingga aksi protes mulai marak
2. Partai politik yang berupaya menjatuhkan pemerintah, sejak tahun 1890 di Jepang telah ada beberapa partai politik yang menghasut massa, diduga mengganggu kentruman dan ketertiban umum.
3. Pada tahun 1904-1905 Jepang berperang dengan Rusia dan kalah. Kemenangan atas Rusia menyiksa beban utang negara Jepang, Jepang tidak memperoleh rampasan perang sepeser-pun dari pihak Rusia membuat rakyat harus menanggung pajak sehingga, rakyat kesulitan hidup, dan kondisi psikologis ini mudah dimanfaatkan oleh partai politik untuk agitasi massa pada saat itu. Pada tahun 1905 terjadi kerumunan massa di Taman Hibiya yang berujung pada massa mengamuk dikota dan menghancurkan disertai perusakan hingga korban jiwa, peristiwa tersebut dikenal dengan nama 'Insiden pembakaran hibiya' atau 'Hibiya incendiary incident 1905'.

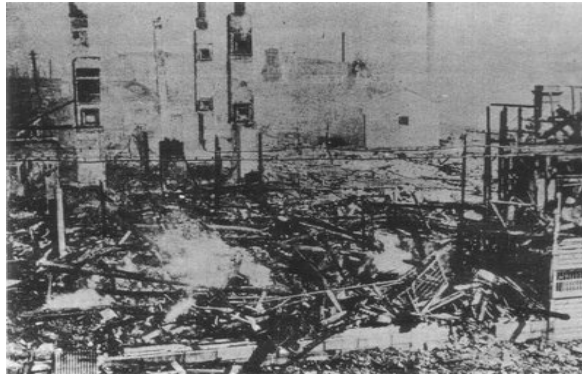
Gambar 1. Dampak dari peristiwa 'Insiden pembakaran hibiya 1905'



Sumber: <http://outsiderjapan.pbworks.com/w/page/9758486/Rice%20Riots%20in%20Japan>

4. Selama perang dunia I tahun 1914-1918, inflasi yang tinggi menyebabkan rakyat yang bekerja sebagai buruh dan petani tetap miskin sedangkan pada saat itu lahir kelas orang kaya baru yang kekayaannya berasal dari pasar produk industri asia yang diambil oleh industri Jepang. Sehingga kesenjangan sosial terjadi antara kaum miskin dengan kaum orang kaya baru yang semakin memicu konflik sosial.
5. Kondisi domestik yang buruk karena faktor dari luar, yaitu pada tahun 1917 pecah revolusi di Rusia dan lahirnya negara komunis pertama di dunia, yaitu Uni soviet. Hal tersebut tersebar dengan cepat ke seluruh dunia, termasuk Jepang dan menginspirasi gerakan radikal.
6. Keresahan masyarakat akibat dari pemerintah mengirimkan pasukan ke Siberia, karena pemerintah juga akan mengangkut pangan terutamanya beras. Mahalnya harga beras pada tahun 1918 memicu kemarahan masyarakat kepada toko beras yang dituduh sengaja menimbun berasa sehingga persediaan pasar menipis dan semakin mahal. Sehingga terjadinya peristiwa 'Huru hara beras' atau 'Rice riots of 1918', yaitu ibu-ibu nelayan menjarah toko beras dan menyerang kantor polis karena dituduh melindungi pemilik beras.

Gambar 2. Dampak dari peristiwa 'Huru hara beras 1918'



Sumber: <http://outsiderjapan.pbworks.com/w/page/9758486/Rice%20Riots%20in%20Japan>

7. Pada tahun 1930, secara global dimula dengan resesi Amerika tahun 1929, kesulitan ekonomi dan semakin meluasnya pemikiran sosialisme akibat berkembangnya media massa memicu amarah terhadap ketidakadilan sosial dan rasa frustrasi karena menjadi penganggur intelektual, menggiring kelompok mahasiswa dan sarjana penganggur ke kubu anti pemerintah.
8. Pasca kekalahan Jepang dalam perang dunia II, banyak generasi muda Jepang yang merasa frustrasi dan mengalami krisis identitas, sampai akhir tahun 1950-an, sebagian besar masyarakat Jepang, terutama mereka yang tinggal di desa dan bekerja sebagai buruh masih hidup dalam kemiskinan. Rasa tidak puas pada generasi muda tersebut dapat berdampak terhadap gerakan sabotase dan bahkan radikalisme.

Dampak dari penjelasan diatas tersebut, yaitu perang membuat masyarakat Jepang berada dalam kesulitan hidup yang cukup tajam terutama kaum petani dan buruh sehingga memicu kejadian-kejadian kerusuhan dari paham ideologi sosialisme membuat masyarakat serta mahasiswa menjadi anti pemerintah. Kemiskinan yang didasari dari kesulitan hidup akibat perang telah membuat pelaksanaan demokrasi menjadi sulit. Menurut Cohen (Georg, 2003: 16) dalam Wirnano (2015: 113), hal tersebut dipertegas sebagai berikut:

Ketika anggota masyarakat kekurangan gizi kronis dan sakit-sakitan, partisipasi dalam persoalan-persoalan umum baik yang luas maupun khusus, menjadi sulit dipertahankan. Ketika seringkali rakyat menderita kelaparan akut, atau ketika penyakit merajalela, harapan demokrasi sejati adalah naif.

Pernyataan diatas dapat diartikan bahwa pemerintah Jepang tidak memikirkan rakyat pada masa perang dan justru terkesan seolah-olah melupakan rakyat kecil dengan mengirimkan bahan pangan ke prajurit yang akan perang, sehingga dari hal tersebut membuat masyarakat miskin kaum petani, kaum buruh menjadi tidak bermoral karena merana dalam kelaparan, bagaimana negara Jepang ingin berkembang ketika rakyatnya sendiri sedang kesulitan untuk hidup dan menimbulkan aksi-aksi protes yang berujung kerusuhan.

Menurut Magis Suseno (Labolo, 2016:11), moral sangat berkaitan dengan budaya dimana moral sendiri bisa berasal dari sebuah wejangan-wejangan, kumpulan peraturan lisan serta patotkan yang sudah ada sebelumnya. Artinya dapat moral merupakan suatu bentuk ukuran untuk menilai perilaku manusia. Selain itu menurut Suyatno (2016: 5) moral baik adalah ajaran tentang sikap atau perilaku yang baik yang terjadi pada tokoh (figur) yang dapat memberikan contoh yang baik serta patut untuk ditiru. Artinya perilaku yang dilakukan tokoh selama hidupnya dapat memberi manfaat kepada masyarakat dan dapat menjadi panutan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah untuk mengarahkan rakyatnya agar menjunjung tinggi moral yang berasal dari budaya dan tokoh (figur) yang bisa menjadi panutan agar masyarakat dapat menjauhi sikap dan tindakan radikal.

2.4 SDM Jepang yang Tidak Kompeten.

2.4.1 Ketidakdisiplinan Masyarakat yang Menghambat Modernisasi Jepang.

Disiplin dalam perilaku sosial seperti tepat waktu, patuh kepada atasan dan aturan-aturan sosial, serta tidak membuang waktu untuk hal yang percuma atau pemanfaatan waktu dengan baik dalam berbagai kegiatan, hal tersebut merupakan sesuatu yang selalu di perhatikan semua kalangan masyarakat Jepang saat ini. Menurut Sukaimi, Syarifiah dan Said (2018: 231), budaya disiplin pada masyarakat Jepang merupakan suatu gambaran kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kempauan mereka serta kebiasaan-kebiasaan

atau pola-pola perilaku yang membentuk struktur sosial dari Masyarakat. Maka dari pernyataan tersebut dapat diartikan seiring berjalan generasi manusia ke generasi berikutnya budaya disiplin akan tetap hidup, terwariskan dan tetap lestari yang dimulai dari jalur pendidikan dalam keluarga contohnya seperti orang tua yang mendidik anaknya agar dapat membentuk karakter anak yang mampu mandiri.

Namun awal mulainya budaya disiplin masyarakat Jepang tidak seperti sekarang ini. Menurut Kattendijke (1994: 57) dalam Ong (2019: 129), menyatakan pandangannya bahwa orang Jepang 150 tahun yang lalu benar-benar santai, tidak peduli dan tidak pernah menepati janji. Pernyataan tersebut juga didukung oleh komentar Takehiko dan Shigehisa (2001: 141-142) dalam Ong (2019: 129), yang juga menyatakan pandangannya terhadap sikap kerja dalam karyawan pada 90 tahun lalu, yaitu keadaan kantor biasanya di waktu pagi masuk kerja, karyawan selalu ngobrol dahulu ke sesama karyawan lainnya, merokok, ke toilet, menerima tamu atau dengan kata lain mondar mandir di ruang kantor sehingga tidak efisien dan terlahirnya konsep terlambat. Sehingga dari dua pendapat tersebut diketahui budaya disiplin Jepang dulu sangat bertolak belakang dengan citra disiplin atau etos kerja pada masyarakat Jepang sekarang ini dan bagaimana mungkin Jepang dapat memodernisasi negaranya apabila rakyatnya masih tidak disiplin. Menurut Rosana (2015: 74), modernisasi mempunyai syarat-syarat salah satunya adalah tingkat organisasi yang tinggi, disatu pihak berarti disiplin, sedangkan dilain pihak berarti pengurangan kemerdekaan. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa apabila masyarakat Jepang tidak disiplin dalam pekerjaan atau segala hak dalam bersosial, maka masyarakat Jepang belum memenuhi syarat untuk bisa menjadi masyarakat modern.

2.4.2 Produktivitas Jepang yang Rendah Pada Sektor Industri.

Di zaman globalisasi yang penuh dengan persaingan untuk menciptakan produk yang sesuai dengan permintaan, Jepang pada saat ini hadir dengan banyak menciptakan produk-produk yang memikat konsumen atau masyarakat dunia. Faktanya menurut Indriani (2010: 98), hal tersebut terjadi karena Jepang melakukan penyempurnaan tempat kerja secara bertahap dalam jangka waktu yang panjang, sebagai contohnya penerapan sikap kerja 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke) untuk menjadikan tempat kerja dalam kondisi lebih baik dari sebelumnya, sehingga sasaran terakhirnya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Perusahaan Jepang sudah sadar akan aspek diperlukannya kerja keras untuk

kenyamanan dalam tempat kerja sehingga meningkatkan produktivitas yang lebih baik dan juga terasa menyenangkan. Namun hal tersebut diawali dari proses peristiwa yang di alami Jepang dahulunya hingga sekarang bisa meningkatkan produktivitas dalam Ong (2019: 132-154), sebagai berikut:

1. Pada 1895 Jepang memenangkan perang dengan Cina, sehingga membuat Jepang memperoleh rampasan perang dari Cina dan Jepang dapat membuka pasar yang sangat besar di sejumlah kota, Pelabuhan di pesisir timur China untuk produk industri Jepang. Akan tetapi sebagaimana dialami semua negara termasuk Jepang sendiri yaitu, pada tahap industrialisasi pasti ditandai dengan masalah rendahnya SDM, efisiensi, dan kemampuan teknologi, dari hal tersebut membuat produk yang dihasilkan tidak kompetitif dalam hal kualitas dan harga.
2. Belum adanya prinsip-prinsip dalam bekerja untuk meningkatkan sistem kerja yang lebih efisien dan produktif. Dengan kata lain belum terciptanya suasana keharmonisan antar buruh dan pengusaha.
3. Pada masa pasca perang dunia I tahun 1919, ekspor dari produk industri Eropa pulih, sehingga berdampak kepada produk industri dari Jepang jauh tertinggal kualitasnya dibandingkan dengan Eropa.
4. Tindakan ekspansi pemerintah militer yang dilakukan Jepang pada perang dunia II menyebabkan tenaga kerja pada sektor produksi seperti pertanian, manufaktur, sektor jasa dan administrasi pemerintahan berkurang drastis yang diakibatkan banyak tenaga laki-laki produktif dikirim ke medan perang dan wilayah penduduk.
5. Pimpinan Militer Jepang yang mengabaikan kalkulasi perbandingan produktivitas Jepang dengan Amerika menjadi salah satu faktor Jepang kalah dalam perang dunia II, sehingga berdampak kepada keterpurukan Jepang. Hal tersebut juga memberi pemahaman Jepang bahwa kekalahan diakibatkan dari kelemahan teknologi dan manajemen yang masih kalah jauh dari Amerika atau kalah karena inefisiensi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kejadian perang membuat sadar Jepang ada kelemahan di bidang teknologi dan manajemen, yang berpengaruh terhadap buruknya produktivitas Industri Jepang. Menurut Husin (2021: 88), Produktivitas adalah salah satu komponen yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan

apabila ingin mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan dan dalam kegiatannya perusahaan tersebut harus mampu meningkatkan produktivitas dari waktu ke waktu karena ini menyangkut pada produksi dari perusahaan itu sendiri. Maka jika Jepang dapat meningkatkan produksi dari perusahaan untuk kepentingan masyarakat Jepang, niscaya dapat membuat masyarakat menjadi semakin modern dalam bekerja dengan disiplin, mampu bekerja efisiensi tinggi di tempat kerja, dan juga masyarakat Jepang akan sejahtera dengan menerima upah yang baik.

